

ABSTRAK

Permasalahan penatagunaan tanah dan perumahan merupakan salah satu permasalahan dalam rangka pengembangan wilayah kota. Pertumbuhan penduduk yang semakin padat ditambah jumlah urbanisasi yang semakin besar membuat lahan perkotaan semakin menyempit. Derasnya arus urbanisasi, ditambah dengan lahan perkotaan yang semakin menyempit menjadi penyebab kenapa tatakelola kota menjadi penting untuk dibahas. Akan tetapi Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengatur mengenai penatagunaan tanah untuk perumahan. Kondisi ini bisa menjadi penyebab utama amburadulnya penatagunaan kota serta perumahan yang tidak mepedulikan lingkungan sekitar.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria terutama pasal 14 yang menjelaskan tentang pengaturan penatagunaan tanah dirancang lebih detail dan lengkap menyesuaikan realita yang berkembang serta pada pasal 15 yang seharusnya mampu mencakup pengaturan penatagunaan tanah pengembangan wilayah kota atas kawasan perumahan secara lebih jelas dan rinci.

Kata kunci : UUPA, Penatagunaan tanah, penataan perumahan.



ABSTRACT

Stewardship of land and housing problems is one of the problems in developing areas of the city. Increasingly dense population growth plus the increasingly large number of urbanization makes urban land narrowing. The rapid urbanization, coupled with urban land increasingly narrowed the cause why the governance of the city becomes important to be discussed. However, the Basic Agrarian Law does not regulate the stewardship of land for housing. This condition could be the main cause of damage to the stewardship of the city and housing do not care about the environment.

This research is a normative juridical using statute approach. The study concluded that the Basic Agrarian Law, especially Article 14, which describes the land stewardship arrangements designed more detailed and complete tailor-growing reality and in article 15, which should be able to include land stewardship arrangements for regional development over the city residential areas more clearly and in detail.

Keyword: Basic Agrarian Law, stewardship of land, housing arrangement.

